



Bareskrim Rahasiakan Tersangka

Kasus Korupsi Kondensat di SKK Migas serta TPPI

JAKARTA - Tidak ada perkembangan berarti dalam pengusutan dugaan korupsi penjualan kondensat yang diduga dilakukan pejabat Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) serta PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) kemarin (6/5).

Bareskrim yang semula aktif mencari barang bukti dengan menggeledah kantor SKK Migas dan TPPI kemarin terkesan membatasi informasi soal saksi serta calon tersangka.

Victor Edison Simanjuntak

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirupideksus) Bareskrim Brigjen Victor Edison Simanjuntak mengakui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat menangani kasus yang sama. Namun, ada kesepakatan bahwa KPK akan menyerahkan sejumlah dokumen kasus tersebut. "Sehingga nanti Bareskrim yang menangani penuh," ujarnya kemarin.

Perkembangan terakhir, berdasar hasil pengusutan Bareskrim, telah ada lima saksi

♦ Ke Halaman 7 kolom 1

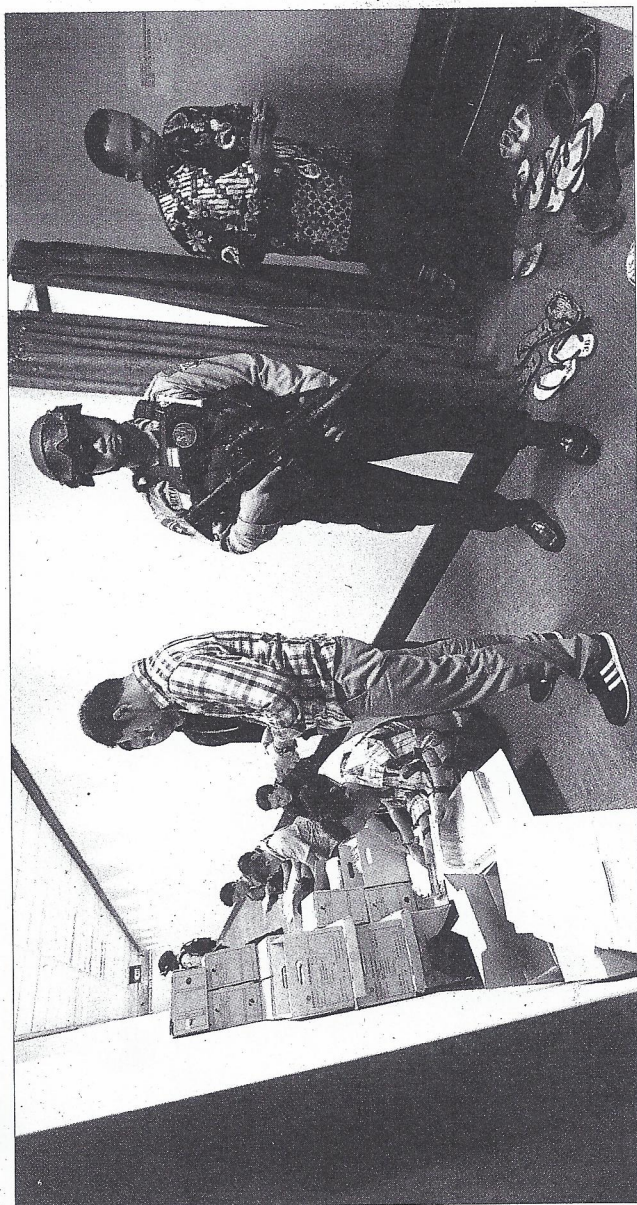


FOTO: RICARDOJPNK.COM

PENGGELEDAHAN: Penyidik Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di Kantor SKK Migas, Jakarta, Selasa (5/5). Penggeledahan ini terkait kasus Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang penjualan kondensat milik negara kepada PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI).



Bareskrim Rahasiakan Tersangka

Sambungan dari halaman 1

yang diperiksa terkait kasus tersebut. "Siapa saja orangnya dan dari mana belum bisa diungkapkan," ucap Victor. Soal mengapa identitas para saksi belum bisa diungkap, dia tidak menjawab dengan jelas. Namun, yang pasti, kasus korupsi kondensat bagian negara itu melibatkan banyak pejabat. Sebelumnya Victor bahkan mengungkapkan, ada satu tersangka dengan inisial DH.

Ditemui secara terpisah, Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso justru memberikan keterangan berbeda. Budi mengatakan, jumlah saksi yang telah diperiksa baru tiga orang, bukan lima seperti disebut Victor. Yang juga mengagetkan, Budi menegaskan, belum ada penetapan tersangka terhadap pihak yang diduga terlibat korupsi tersebut. "Belum ada tersangka, masih diperiksa," tegasnya. Soal siapa DH yang disebut sebagai tersangka oleh Victor, Budi menyatakan bahwa penyidik Bareskrim masih bekerja. "Jangan berandai-andai dulu ya," tuturnya.

Yang juga penting, ternyata ada kabar bahwa kasus tersebut merupakan pesanan seseorang. Dikonfirmasi terkait hal itu, Budi justru meminta penegakan hukum tidak dihubungkan dengan partai. "Ini murni penegakan hukum ya," tegasnya.

Saat ini posisi kasus tersebut sudah masuk tingkat penyidikan. Dengan begitu, upaya paksa berupa penggeledahan bisa dilakukan. Izin dari PN Jakarta Selatan juga sudah turun kemarin. "Nanti perkembangannya

diusahakan secepatnya," ujar Budi.

Audit BPK

Kasus dugaan megakorupsi sektor migas yang melibatkan SKK Migas dan PT TPPI rupanya sudah lama menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 setebal 69 halaman yang diperoleh Pontianak Post kemarin, BPK sudah membeberkan detail temuan dalam kasus TPPI yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 1,35 triliun. Bukan hanya para pejabat BP Migas, pejabat di Kementerian Keuangan pun masuk daftar pihak yang dinilai bertanggung jawab.

Dalam dokumen 2013 yang ditandatangani Ketua BPK Hadi Poernomo itu, auditor BPK menemukan adanya potensi piutang tak tertagih kepada TPPI akibat kegagalan pelunasan atas pasokan bahan baku kondensat bagian negara dari Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas/badan lama SKK Migas) yang saat itu dipimpin R Priyono.

Ada tiga temuan besar yang diungkap BPK. Pertama, BP Migas tidak melaksanakan ketentuan prosedur penunjukan langsung TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara. BPK menyebutkan, penetapan kali pertama TPPI sebagai penjual kondensat ternyata diputuskan pejabat yang tidak berwenang, yakni deputi finansial ekonomi dan pemasaran BP Migas. Padahal, sesuai pedoman tata kerja,

mekanisme penunjukan langsung hanya bisa dilakukan kepala BP Migas.

Temuan kedua, mekanisme pembayaran tidak langsung TPPI yang disetujui menteri keuangan sulit dilaksanakan. Audit BPK menunjukkan, Menteri Keuangan (saat itu) Sri Mulyani mengetahui bahwa TPPI tengah terbelit masalah finansial karena sudah mendapat surat dari manajemen PT tersebut.

Namun, menteri keuangan masih tetap memberikan persetujuan mekanisme pembayaran tidak langsung. Rujukan yang dipakai adalah surat deputi finansial ekonomi dan pemasaran BP Migas. Dalam pelaksanaan kontrak, akhirnya terbukti TPPI tidak mampu membayar pemerintah atas kondensat yang dipasok BP Migas.

Temuan ketiga, BP Migas tidak mengelola penjualan kondensat bagian negara oleh TPPI sesuai kontrak. Salah satunya, BP Migas tidak melakukan langkah optimal dalam penagihan piutang negara, misalnya karena 58 kali terlambat menerbitkan invoice penagihan pembayaran kondensat. Selain itu, meski sudah berkali-kali terlambat atau tidak membayar, BP Migas tetap menyalurkan kondensat ke TPPI. Akibatnya, tagihan tak terbayar pun kian menumpuk.

Bukan hanya itu, BP Migas juga malah memperpanjang kontrak penjualan kondensat kepada TPPI tanpa kajian memadai. Bahkan, auditor BPK menemukan adanya surat dari deputi pengendalian operasi BP Migas kepada Kementerian Keuangan pada 25 Mei 2010 yang tidak me-

nyajikan informasi yang benar. Sehingga perpanjangan kontrak akhirnya disetujui Kementerian Keuangan.

Atas berbagai temuan tersebut, BPK lantas memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menjatuhkan sanksi bagi pejabat-pejabat pada instansi terkait yang terbukti lalai dalam penunjukan TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara. Selain itu, pemerintah harus mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin tertagihnya piutang negara.

Diungkap Nazaruddin

Sementara itu, sumber di internal SKK Migas menyatakan, polisi mencari tindak pidana bisnis tersebut melalui kasus M. Nazaruddin. Mantan bendahara umum Partai Demokrat yang kini menjadi terpidana KPK itu sempat menyebut proyek kilang TPPI di persidangan pada Agustus 2014.

Saat itu Nazaruddin mengatakan, ada uang USD 1 juta untuk Marzuki Alije, mantan ketua DPR. Dari pengakuan tersebut, penegak hukum seperti KPK dan Polri melakukan penelusuran. Lantas, muncul temuan bahwa TPPI punya banyak utang. "Dari situ langsung dikejar dan terbongkar," ucapnya.

Terpisah, Kepala Humas SKK Migas Rudianto Rimbono tidak mau berbicara banyak soal kasus itu dengan alasan sudah menjadi ranah polisi. Dia hanya memastikan bahwa kemarin tidak ada penggeledahan lagi yang dilakukan Bareskrim. "Soal materi perkara, saya tidak tahu. Tunggu saja dari Bareskrim," ucapnya. (idr/dim/c9/kim)